TINGKAT KONSUMSI TELUR DAN VARIASI KESEIMBANGAN PRODUKSI-KONSUMSI ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

A. ROZANY NURMANAF

Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Jl. Jend. A. Yani 70, Bogor 16161

ABSTRAK

Telur adalah salah satu sumber protein hewan yang mengandung nutrisi yang baik bagi kehidupan manusia. Konsumsi telur lebih tinggi dari pada konsumsi hasil ternak lain, karena mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Produksi telur secara agregat meningkat tajam khususnya di tahun-tahun 1980an dan berlanjut secara kontinu hingga sekarang. Produksi telur dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pendukung pengembangannya. Produksi telur yang dihasilkan oleh usaha peternakan komersial memiliki kontribusi produksi lebih besar dan semakin meningkat dari waktu ke waktu, tetapi pada saat yang sama kontribusi produksi telur ayam buras dan telur itik terus menurun. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan produksi telur dari kedua jenis ternak yang terakhir lebih lambat. Variasi tingkat konsumsi erat hubungannya dengan kebiasaan spesifik suatu wilayah, seperti kebudayaan dan adat istiadat daerah setempat. Kebiasaan tersebut mempengaruhi pola konsumsi suatu komunitas. Keseimbangan produksi-konsumsi bervariasi antar provinsi. Rasio keseimbangan menghasilkan tiga kriteria, yaitu provinsi-provinsi dengan keseimbangan surplus, keseimbangan cukup dan keseimbangan defisit. Provinsi-provinsi dengan keseimbangan surplus merupakan pemasok telur bagi provinsi lain yang memiliki keseimbangan defisit.

Kata kunci: Produksi telur, konsumsi telur, keseimbangan produksi-konsumsi

ABSTRACT

EGG CONSUMPTION LEVEL AND THE VARIATION OF PRODUCTION-CONSUMPTION BALANCING AMONG PROVINCES IN INDONESIA

The egg is one of animal protein sources which content good nutrition for human life. Egg consumption is larger than the consumption of another animal production because it was easy to found and cheaper in price. Aggregate egg production increase significantly, especially in the years after 1980 and it continued consistently until now. The higher or the lower of egg production are affected by several development supporting factors. Egg production produced by commercial chicken farming system have a larger production contribution and become larger and larger from time to time, but in the same time the egg production contribution from native chicken and duck are precisely decrease. That is because egg production rate of those two are slower. Consumption rate variation is close relation with the specific tradition of the region, like local culture, tradition and habit of community. These features affect consumption pattern of the society. Production-consumption balancing vary among provinces. Balanced ratio of those, production and consumption, yields three criteria, namely the provinces which have *surplus balancing*, *sufficien balancing* and *deficit balancing.* The provinces with surplus balancing can be called as the egg supplier for other provinces with deficit balancing.

Key words: Egg production, egg consumption, production-consumption path

PENDAHULUAN

Dua indikator mutu gizi yang umum digunakan untuk menentukan status gizi adalah tingkat konsumsi energi dan protein. Seseorang dapat hidup sehat dan aktif melakukan aktivitas sehari-hari secara produktif memerlukan keseimbangan protein dan energi berturut-turut sebesar 46,2 g/kapita/hari dan 2150 Kkal/kapita/hari (LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, 1998). Sementara itu, hasil perhitungan LATIEF *et al.* (2000) dari data Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) menunjukkan bahwa rata-rata *intake* protein relatif stabil selama tahun 1995–1998, masing-masing 46,0; 49,5; 49,9 dan 49,1 g/kapita/hari. Dalam periode yang sama terjadi perubahan prevalensi rumah tangga defisit protein antara 1995–1998 menurut wilayah perkotaan dan pedesaan. Tahun 1995 persentase rumah tangga defisit protein sebesar 49,5% di perkotaan yang lebih kecil daripada di pedesaan, yaitu 53,8%. Sedangkan tahun 1998 persentase tersebut justru terjadi sebaliknya, di perkotaan sebesar 51,1% yang lebih besar daripada di pedesaan sebesar 47,5%. Dari STATISTIK PETERNAKAN (1998) dapat dihitung bahwa rata-rata laju pertumbuhan tingkat konsusmsi

telur per kapita per hari sebesar 0,34%/tahun. Kekurangan konsumsi dari standar minimum akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, aktivitas dan produktivitas kerja, yang dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia (LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, 2000).

Salah satu sumber protein hewani untuk kebutuhan konsumsi adalah telur. Bahan makanan ini mengandung gizi yang baik untuk kehidupan manusia. Fakta yang ada menunjukkan bahwa konsumsi telur lebih besar daripada konsumsi hasil ternak lain, karena telur mudah diperoleh dengan harga relatif murah dan terjangkau bagi anggota masyarakat yang mempunyai daya beli rendah (SALIEM *et al*., 2001). Tingkat konsumsi telur antar komunitas masyarakat sangat bervariasi. Dengan menggunakan data SUSENAS tahun 1993 dan 1996, ERWIDODO *et al.* (1999) menunjukkan bahwa masyarakat di perkotaan mengkonsumsi telur lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Disamping itu, dari data yang sama juga diperlihatkan adanya hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan rata-rata konsumsi telur. Pada analisis lain ERWIDODO *et al.* (1998) merinci bahwa rata-rata konsumsi telur ayam lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi telur itik. Proporsi konsumsinya secara agregat juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Sedangkan RACHMAN dan SUPRIYATI (2004) menemukan bahwa tingkat partisipasi konsumsi telur cenderung meningkat antara tahun 1997–1999 (kasus di pedesaan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan), baik di wilayah dengan agroekosistem lahan sawah maupun lahan kering. Sementara itu, dalam struktur konsumsi masyarakat di pedesaan, telur merupakan sumber protein penting ke 4 setelah ikan, daging dan tahu/tempe.

Pada kenyataannya, produksi telur memang meningkat dalam tiga dasawarsa terakhir (DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN, 2002). Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah apakah dengan tingkat konsumsi telur yang juga cenderung meningkat dapat dipenuhi dari produksi yang ada. Produksi telur sangat bervariasi antara wilayah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, permodalan dan prospek pemasaran. Provinsi-provinsi yang memiliki faktor-faktor tersebut dan dikelola dengan efisien menjadikan usaha peternakan penghasil telur dapat berkembang dengan baik. Sementara, tingkat konsumsi telur itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola konsumsi, tingkat pendapatan, pendidikan dan sebagainya, di samping perbedaan antara wilayah seperti di perkotaan dan di pedesaan bahkan antar provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mendiskusikan beberapa aspek yang meliputi antara lain perkembangan tingkat produksi telur, variasi dan ragam tingkat konsumsi serta keseimbangan antara produksi dan konsumsi telur menurut provinsi di Indonesia.

PERKEMBANGAN PRODUKSI TELUR

Dengan semakin berkembangnya teknologi peternakan khususnya peternakan unggas penghasil telur, telah meningkatkan produktivitas dan produksi telur secara nasional. Produksi telur secara agregat merupakan penjumlahan dari ketiga jenis telur, yaitu telur ayam ras, telur ayam bukan ras (buras) dan telur itik. Perkembangan produksi telur nasional menurut jenis selama periode 1969–2000 disajikan pada Gambar 1.

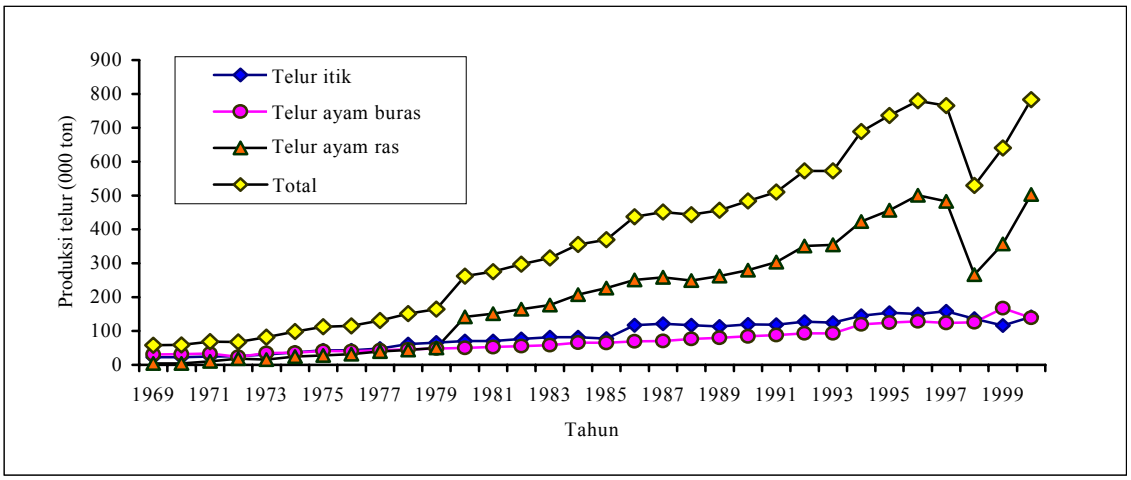

Sumber: DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN (2001)

Gambar 1. Perkembangan produksi telur nasional menurut jenis selama periode 1969-200

Agregat nasional produksi telur terus meningkat secara signifikan. Lonjakan yang besar terjadi pada tahun 1980 saat investasi pada usaha peternakan unggas meningkat yang didukung oleh kondisi perekonomian yang kondusif. Banyak investor menanamkan modalnya pada usaha ini yang turut membangun subsektor peternakan khususnya usaha peternakan unggas penghasil telur. Kecenderungan demikian terus berlanjut sampai terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Adanya krisis berakibat pada kelangsungan perkembangan usaha peternakan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan produksi telur tahun 1998. Bahan baku pakan ternak dan obat-obatan yang didominasi komponen impor merupakan faktor utama merosotnya perkembangan usaha peternakan di Indonesia, disamping secara keseluruhan krisis ekonomi juga menurunkan daya beli sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, produksi telur secara agregat kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Bila dirinci menurut jenisnya, produksi telur ayam ras mempunyai laju pertumbuhan produksi yang besar dan terus meningkat dibandingkan dengan kedua jenis telur lainnya. Produksi telur ayam ras meningkat tajam selama periode 1969–2000. Sedangkan peningkatan produksi telur ayam buras dan telur itik dalam periode yang sama tidak secepat peningkatan produksi telur ayam ras. Produksi telur ayam buras dan telur itik memang meningkat lebih lambat dan dengan fluktuasi yang seirama. Namun demikian, krisis ekonomi yang terjadi seolah-olah tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan produksi telur ayam buras dan telur itik, sementara terhadap produksi telur ayam ras pengaruh tersebut terlihat dengan jelas. Seperti telah dijelaskan pada bagian depan, hal ini terjadi akibat tingginya penggunaan komponen impor dalam bahan baku pakan dan obat-obatan pada usaha peternakan ayam ras, sementara pada usaha peternakan ayam buras dan itik penggunaan komponen yang demikian sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Dari fenomena tersebut ternyata usaha peternakan ayam ras lebih sensitif terhadap perubahan struktur ekonomi terutama dalam hal fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing antara lain dollar Amerika.

Seperti telah disebutkan di bagian depan bahwa kontribusi produksi telur ayam ras terhadap total produksi telur secara keseluruhan sangat besar dan semakin meningkat selama kurun waktu 1969-2000. Dinamika kontribusi masing-masing jenis telur selama tiga dasawarsa ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 2. Sesuai dengan tingginya laju peningkatan produksi telur ayam ras yang terjadi sejak tahun 1980 mengakibatkan semakin besar kontribusinya terhadap produksi telur nasional sejak saat itu. Selanjutnya prestasi ini secara konsisten terus berlanjut bahkan cenderung semakin besar, terutama disebabkan lambatnya laju peningkatan produksi telur ayam buras dan produksi telur itik.

Tabel 1. Kontribusi produksi telur menurut jenis selama periode 1969–2000

Tahun	Produksi (000 ton)	Kontribusi produksi menurut jenis telur (%)		
		Ayam buras	Ayam ras	Itik
1969	57,7	53,6	7,3	39,2
1970	58,6	53,4	7,3	39,2
1971	68,4	48,5	15,9	35,5
1972	67,5	34,7	27,0	38,4
1973	81,4	43,5	19,2	37,3
1974	98,1	36,8	25,3	37,9
1975	112,2	36,7	25,0	38,3
1976	115,6	35,0	27,6	37,4
1977	131,4	33,0	30,0	37,0
1978	151,0	30,3	28,9	40,8
1979	164,5	29,5	30,6	39,9
1980	262,6	19,2	53,9	26,9
1981	275,2	19,3	55,1	25,6
1982	297,0	18,8	55,5	25,7
1983	316,0	18,4	55,9	25,8
1984	355,3	18,5	58,3	23,1
1985	369,9	17,7	61,4	20,9
1986	437,2	15,9	57,3	26,8
1987	451,5	15,7	57,4	27,0
1988	443,1	17,3	56,2	26,5
1989	456,2	17,6	57,4	24,9
1990	484,0	17,5	57,8	24,7
1991	510,4	17,2	59,5	23,3
1992	572,3	16,3	61,3	22,4
1993	572,9	16,3	61,9	21,7
1994	688,6	17,4	61,5	21,1
1995	736,1	17,0	62,1	20,9
1996	779,8	16,5	64,2	19,3
1997	765,0	16,2	63,2	20,7
1998	529,8	23,8	50,4	25,8
1999	640,4	26,1	55,8	18,1
2000	783,3	17,7	64,2	18,0

Sumber: Dihitung dari DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN (2002)

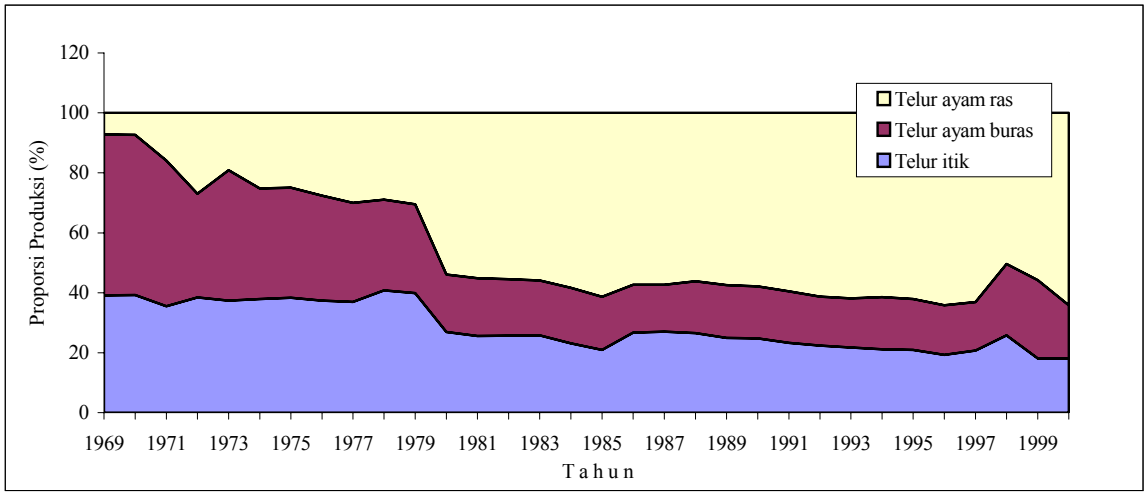

Sumber: DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN (2002)

Gambar 2. Proporsi produksi telur menurut jenis selama periode 1969-2000

Dari data yang disajikan baik dari Tabel 1 dan dari Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi telur secara agregat lebih dominan disebabkan peningkatan produksi telur ayam ras ketimbang peningkatan produksi telur ayam buras dan telur itik. Dengan perkataan lain, peningkatan produksi telur ayam ras berperanan besar dalam peningkatan produksi telur secara agregat.

KERAGAMAN TINGKAT KONSUMSI

Secara umum, beberapa studi seperti RACHMAN dan WAHIDA (1998), ARIFIN dan SIMATUPANG (1998), SURYANA *et al.* (1998) mengindikasikan bahwa pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, berbeda antar agroekosistem, antar kelompok pendapatan, antar etnis/ suku dan antar waktu. Sejalan dengan itu, tingkat konsumsi telur, diduga juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih spesifik, antara lain pola makan, tingkat pendidikan yang berkaitan dengan pengertian akan perlunya makanan bergizi, tingkat pendapatan, dan perbedaan lokasi/wilayah seperti perkotaan dan pedesaan, antar provinsi, antar pulau dan sebagainya. Dari data SUSENAS BPS telah dilakukan penghitungan menurut kriteria yang spesifik. ERWIDODO *et al.* (1998) membedakan tingkat konsumsi telur menurut perkotaan dan pedesaan, jenis telur yang dikonsumsi dan tingkat pendapatan, seperti ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat konsumsi telur menurut jenis telur, wilayah dan kemiskinan

Wilayah dan jenis telur	Di bawah garis kemiskinan		Di atas garis kemiskinan	
	kg/kap/ tahun	%	kg/kap/ tahun	%
Perkotaan				
Telur ayam	2,06	78,6	5,25	89,4
Telur itik	0,56	21,4	0,62	10,6
Total	2,62	100,0	5,87	100,0
Pedesaan				
Telur ayam	0,79	77,5	2,55	78,5
Telur itik	0,23	22,5	0,70	21,5
Total	1,02	100,0	3,25	100,0
Perkotaan dan Pedesaan				
Telur ayam	1,43	78,1	3,90	85,5
Telur itik	0,40	21,9	0,66	14,5
Total	1,83	100,0	4,56	100,0

Sumber: ERWIDODO *et al.* (1998)

Dari Tabel 2 dapat diidentifikasikan bahwa tingkat konsumsi telur pada masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada kuantitas telur yang dikonsumsi oleh masyarakat di pedesaan, baik pada kelompok masyarakat yang hidup di bawah maupun di atas garis

kemiskinan. Sedangkan masyarakat miskin itu sendiri mengkonsumsi telur tidak sebanyak yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak miskin. Di sisi lain, RACHMAN dan SUPRIYATI (2004) mengidentifikasikan bahwa pangsa pengeluaran untuk telur terhadap total pengeluaran pangan sumber protein terjadi peningkatan dari 24,4% tahun 1997 menjadi 24,9% tahun 1999. Sementara itu, dengan menghitung data SUSENAS, SUDARYANTO *et al.* (2000) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tingkat konsumsi telur selama periode 1993–1996, baik rumah tangga dari kelompok pendapatan rendah, sedang maupun tinggi.

Selanjutnya, secara umum tingkat konsumsi telur ayam lebih tinggi daripada konsumsi telur itik. Di pedesaan, proporsi konsumsi telur ayam dibandingkan dengan konsumsi telur itik untuk masyarakat miskin adalah dengan perbandingan 77,5% dan 22,5%. Perbandingan ini hampir sama dengan yang terjadi pada masyarakat tidak miskin, yaitu 78,5% dan 21,5%. Akan tetapi ternyata sangat berbeda dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Proporsi konsumsi telur ayam dan telur itik pada masyarakat miskin di perkotaan, mirip dengan proporsi konsumsi telur pada masyarakat di pedesaan, yaitu 78,6% dan 21,4%. Padahal pada masyarakat tidak miskin di perkotaan proporsi konsumsi tersebut sangat berbeda, yaitu hampir 90% konsumsi telur adalah telur ayam dan hanya sekitar 10% dari telur itik.

Lebih spesifik, SALIEM *et al*. (2001), merinci dari data SUSENAS (1999) tentang tingkat konsumsi telur menurut derajat ketahanan pangan. Secara signifikan, data tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa tingkat konsumsi telur semakin rendah dengan semakin rendahnya derajat ketahanan pangan. Anggota masyarakat yang termasuk kriteria *tahan pangan* mengkonsumsi telur lebih tinggi dibandingkan dengan berturut-turut terhadap *rentan pangan*, *kurang pangan* dan *rawan pangan*, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Tabel 3).

Tabel 3. Tingkat konsumsi telur menurut derajat ketahanan pangan, 1999 (kg/kap/tahun)

Daerah	Derajat ketahanan pangan			
	Tahan pangan	Rentan pangan	Kurang pangan	Rawan pangan
Perkotaan	6,66	5,17	3,96	2,97
Pedesaan	4,25	3,08	2,48	1,79
Perkotaan dan Pedesaan	5,92	3,70	3,57	2,23

Sumber: SALIEM *et al*. (2001)

Perbedaan tingkat konsumsi telur juga terjadi antar wilayah yang lebih luas, antara lain menurut pulau-pulau besar di Indonesia. Diduga, terdapat ciri-ciri yang spesifik mengenai kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan dari anggota masyarakat di masing-masing pulau tersebut. Ciri-ciri ini, baik langsung maupun tidak langsung turut membedakan pola konsumsi anggota masyarakatnya termasuk pola makan, ragam makanan dan masakan, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat konsumsi telur. Dari data SUSENAS BPS, dirinci tingkat konsumsi telur menurut pulau-pulau besar di Indonesia (Tabel 4). Rata-rata konsumsi telur dari masing-masing pulau di Indonesia memperlihatkan variasi yang besar. Masyarakat di pulau Sumatera dan Jawa mengkonsumsi telur lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lain, terutama terhadap masyarakat di pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sementara itu, walaupun rata-rata konsumsi telur masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara lebih tinggi daripada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, tidak sebesar tingkat konsumsi telur masyarakat di pulau Sumatera dan Jawa.

Tabel 4. Rata-rata konsumsi telur menurut pulau-pulau besar di Indonesia, 2000

Wilayah menurut pulau-pulau besar	Rata-rata konsumsi telur (kg/kapita/tahun)[1]
Sumatera	4,3
Jawa	4,5
Kalimantan	2,6
Sulawesi	2,4
Bali dan Nusa Tenggara	3,2
Maluku dan Papua	2,5

[1]Rata-rata konsumsi telur tahun 2000 diprediksi dari data SUSENAS 1993, 1996 dan 1999

Sumber: Data SUSENAS BPS (1993;1996; 1999)

KESEIMBANGAN PRODUKSI DAN KONSUMSI TELUR

Seperti diuraikan di bagian depan tulisan ini bahwa tingkat konsumsi telur yang bervariasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan antar wilayah. Sementara itu, masing-masing wilayah juga bervariasi dalam potensi dan kemampuan memproduksi telur. Bertolak dari dua kenyataan ini, perlu diidentifikasikan perihal keseimbangan antara jumlah telur yang dikonsumsi dan telur yang dihasilkan untuk masing-masing wilayah. Keseimbangan antara kedua aspek ini dihitung sebagai rasio konsumsi terhadap produksi telur. Keseimbangan yang dirinci menurut provinsi disajikan pada Tabel 5. Ternyata, keseimbangan antara produksi dan konsumsi telur di masing-masing provinsi sangat bervariasi. Pada provinsi-provinsi tertentu kuantitas telur yang

diproduksi dapat melampaui jumlah yang dikonsumsi (didefinisikan sebagai *keseimbangan surplus,* nilai rasio >1). Sementara provinsi-provinsi lain, baru pada tahap pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakatnya, cukup atau hampir mencukupi (*keseimbangan cukup,* nilai rasio ± 1) dan beberapa provinsi lainnya justru memerlukan pasokan dari luar provinsi yang bersangkutan karena telur-telur yang dihasilkan masih jauh bahkan sangat jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakatnya (*keseimbangan defisit*, nilai rasio <1).

Tabel 5. Keseimbangan konsumsi dan produksi telur menurut provinsi, tahun 2000

Provinsi	Produksi[1] (ton/tahun)	Konsumsi[2] (ton/tahun)	Rasio P/K[3]
Nanggroe Aceh Darussalam	24212	6765,4	3,58
Sumatera Utara	117548	44876,6	2,62
Sumatera Barat	42742	18663,1	2,29
Riau	8161	25678,0	0,32
Jambi	5935	9628,7	0,62
Sumatera Selatan	34349	34904,1	0,98
Bengkulu	2132	6873,2	0,31
Lampung	34634	25931,8	1,34
DKI Jakarta	1076	62603,1	0,02
Jawa Barat	162676	188427,2	0,86
Jawa Tengah	111049	95864,9	1,16
DI Yogyakarta	12106	13418,1	0,90
Jawa Timur	119476	107774,6	1,11
Bali	18500	16993,8	1,09
Nusa Tenggara Barat	3638	9193,4	0,40
Nusa Tenggara Timur	4792	6855,3	0,70
Kalimantan Barat	15433	12692,0	1,22
Kalimantan Tengah	1634	4682,6	0,35
Kalimantan Selatan	17467	7439,3	2,35
Kalimantan Timur	7606	14415,7	0,53
Sulawesi Utara	7448	8130,5	0,92
Sulawesi Tengah	4281	7043,4	0,61
Sulawesi Selatan	35074	14823,2	2,37
Sulawesi Tenggara	5051	3552,6	1,42
Maluku	1580	2911,6	0,54
Papua	3164	5773,1	0,55

[1]DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN (2002)

[2]Dihitung dari perkalian jumlah penduduk tahun 2000 (BPS, 2001) dengan rata-rata tingkat konsumsi tahun 2000 diestimasi berdasarkan data SUSENAS (1993; 1996; 1999)

[3]Dihitung sebagai rasio produksi terhadap konsumsi

Di Sumatera, produksi telur di provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara dan Sumatera Barat jauh melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Di Nanggroe Aceh Darussalam produksi telur mencapai lebih dari tiga kali kebutuhan konsumsi. Sementara itu, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat produksi telur melebihi dua kali konsumsi. Usaha peternakan unggas penghasil telur di Lampung sudah mampu memproduksi telur 30% diatas kebutuhan konsumsi. Sedangkan di Sumatera Selatan, produksi telur dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Akan tetapi, provinsi-provinsi lain seperti Jambi produksi telur hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 60%, bahkan di Riau dan Bengkulu, lebih rendah lagi, yaitu sedikit lebih besar 30% dari kebutuhan konsumsi masyarakatnya.

Dari lima provinsi di Jawa, hanya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi telur dari produksi sendiri (sekitar 10% di atas kebutuhan). Sementara Jawa Barat dan DI Yogyakarta, masih harus mendatangkan telur dari luar provinsi, karena produksi telur dari provinsi sendiri baru mencapai masing-masing sebesar 86% dan 90% dari kebutuhan. Malahan, produksi telur di Provinsi DKI Jakarta sangat rendah dan hampir seluruh kebutuhan telur harus didatangkan dari luar provinsi.

Provinsi Bali telah berhasil mencukupi kebutuhan konsumsi telur dari produksi yang dihasilkan di provinsi sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio produksi konsumsi Provinsi Bali sebesar 1,09. Berbeda dengan di Provinsi Bali, dua provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki kemampuan memproduksi telur masih rendah dan menyumbang kebutuhan konsumsi masing-masing hanya sebesar 40% dan 70%, dengan konsekuensi harus mendatangkan kekurangannya dari luar provinsi yang bersangkutan. Sementara itu, provinsi-provinsi di pulau Kalimantan, juga bervariasi dalam keseimbangan produksi dan konsumsi telur. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan mampu memproduksi telur melebihi kebutuhan konsumsi dengan rasio keseimbangan produksi konsumsi masing-masing sebesar 1,22 dan 2,35. Akan tetapi dua provinsi lain di wilayah ini, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur justru memiliki keseimbangan produksi dan konsumsi yang defisit, dengan rasio masing-masing sebesar 0,35 dan 0,53.

Keadaan serupa juga dijumpai di wilayah Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara memiliki surplus produksi bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi, dengan rasio masing-masing sebesar 2,37 dan 1,42. Tapi di Provinsi Sulawesi Utara, kebutuhan konsumsi telur hampir seluruhnya (92%) dapat dipenuhi dari produksi dalam provinsi sendiri; sedangkan di Sulawesi Tengah, masih diperlukan pasokan telur dari luar provinsi karena

produksi dari dalam provinsi baru sampai pada pemenuhan kebutuhan konsumsi sebesar 61%. Akhirnya, di dua provinsi paling timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua, kebutuhan konsumsi telur yang dipenuhi dari produksi dalam provinsi hanya sekitar separuhnya, masing-masing 54% dan 55%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Produksi telur secara agregat meningkat signifikan khususnya di tahun-tahun 1980an dan secara konsisten terus berlanjut hingga saat ini. Tinggi dan rendahnya produksi dan produktivitas usaha peternakan penghasil telur erat kaitannya dengan berbagai faktor pendukung pengembangannya, seperti potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, aplikasi paket teknologi, tersedianya permodalan dan prospek pemasaran. Bila dirinci menurut jenisnya, telur ayam ras memberikan kontribusi produksi yang besar dan cenderung semakin meningkat, sementara telur ayam buras dan telur itik justru sebaliknya yang semakin mengecil sebagai akibat pertumbuhan produksi kedua jenis telur yang terakhir ini lebih lambat. Walaupun demikian, usaha peternakan ayam ras ternyata lebih sensitif terhadap perubahan struktur perekonomian dibandingkan dengan usaha peternakan ayam buras dan peternakan itik, seperti saat terjadinya kasus krisis ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan peternakan unggas penghasil telur di Indonesia di masa mendatang diperlukan program yang mengarah dan berorientasi pada pengurangan ketergantungan pada faktor-faktor produksi dan paket teknologi yang berasal dari luar. Stimulasi untuk meningkatkan peranan komponen domestik seyogyanya perlu diprioritaskan. Dalam hal tingkat konsumsi telur, terbukti sangat bervariasi dalam perbedaan-perbedaan seperti antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan, antar klas pendapatan, antar wilayah dan provinsi. Variasi tingkat konsumsi, pada dasarnya erat kaitannya dengan ciri-ciri yang spesifik antara lain kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan dari anggota masyarakat. Ciri-ciri ini, baik langsung maupun tidak langsung turut membedakan pola konsumsi anggota masyarakatnya termasuk pola makan, ragam makanan dan kreativitas penyusunan menu masakan yang selanjutnya mempengaruhi tingkat konsusmsi telur. Selanjutnya, keseimbangan antara produksi dan konsumsi sangat bervariasi antar provinsi di Indonesia. Nilai rasio keseimbangan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu total produksi dan total konsumsi yang menghasilkan tiga kriteria wilayah dan provinsi, yaitu provinsi-provinsi dengan *keseimbangan surplus*, *keseimbangan cukup* dan *keseimbangan defisit*. Bagi provinsi-provinsi dengan keseimbangan surplus diartikan sebagai pemasok telur bagi provinsi lain yang memiliki keseimbangan defisit. Dalam kondisi seperti ini, kelancaran komunikasi dan transportasi dalam perdagangan antar wilayah dan propvinsi menjadi faktor yang sangat berperanan. Prasarana dan sarana yang mencukupi menjadikan pemasaran dalam tataniaga hasil ternak lebih efisien sampai pada tingkat konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

ARIFIN, M. dan P. SIMATUPANG. 1998. Pola Konsumsi dan Kecukupan Kalori dan Protein di Pedesaan Sumatera Barat. Prosiding PATANAS: Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi.

BADAN PUSAT STATISTIK. 2001. Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000. Seri L2.2. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN. 1998. Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.

DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN. 2002. Buku Statistik Peternakan 2001. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian.

ERWIDODO, B. SANTOSO, M. ARIANI, V. SIAGIAN DAN E. ARININGSIH. 1998. Perubahan Pola Konsumsi Protein Hewani di Indonesia: Analisis Data Susenas. Laporan Penelitian. Puslit Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

ERWIDODO, H.P.S. RACHMAN, M. ARIANI dan E. ARININGSIH. 1999. Pengkajian Diversifikasi Konsumsi Pangan Utama di Indonesia. Laporan Penelitian. Puslit Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

LATIEF, D., ATMARITA, MINARTO, A. BASUNI dan R. TILDEN. 2000. Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi. Dalam LIPI: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. 1998. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI, LIPI, Jakarta.

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. 2000. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VII, LIPI, Jakarta.

RACHMAN, H.P.S. dan SUPRIYATI. 2004. Pola Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga (Kasus Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan). Makalah dipresentasikan pada Seminar Rutin Puslitbang Sosek Pertanian. 30 Januari 2004.

RACHMAN, H.P.S. dan WAHIDA. 1998. Dinamika Pola Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga serta Prospek Permintaan Pangan. Dalam Dinamika Ekonomi Pedesaan: Perubahan Struktur Pendapatan, Ketenagakerjaan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga. Puslit Sosial Ekonomi Pertanian-Ford Foundation.

SALIEM, H.P., E.M. LOKOLLO, T.B. PURWANTINI, M. ARIANI dan Y. MARISA. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

SUDARYANTO, T., I-W. RUSASTRA, P. SIMATUPANG dan M. ARIANI. 2000. Reorientasi Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan Pasca Krisis Ekonomi. Dalam LIPI: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

SURYANA, A., B. RACHMAN dan P.U. HADI. 1998. Pola Pengeluaran untuk Konsumsi di Pedesaan Jawa Barat. Prosiding PATANAS: Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi.